

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SOSIALISASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN
Jati Diri Mengukuhkan Kehidupan Kebangsaan Indonesia
Disampaikan pada Pengenalan Kegiatan Akademik dan
Kemahasiswaan (PEKAK) Akademi Kebidanan Abdi Husada
Semarang**



**Agus Sutono, S.Fil., M.Phil.
NPP. 107801284**

**FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI SEMARANG
TAHUN 2013**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat lindungannya kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi empat pilar kebangsaan dapat diselenggarakan dengan baik.

Kami menyadari bahwa terlaksananya kegiatan ini berkat bantuan dan peran serta dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

- Rektor IKIP PGRI Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan ini
- Dekan FPIPS IKIP PGRI Semarang yang telah mengizinkan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian fakultas kepada masyarakat.
- Ketua Akademi Kebidanan Abdi Husada Semarang yang telah mengajukan permohonan kemitraan dan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan ini sekaligus memfasilitasi kegiatan sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
- Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ini.

Tidak ada gading yang tak retak, untuk itu kritik dan saran akan sangat kami harapkan demi penyempurnaan kegiatan-kegiatan berikutnya sehingga dapat mendorong bobot kualitas kegiatan yang diselenggarakan berikutnya.

Semarang ,3 September 2013

Agus Sutono, S.Fil., M.Phil



INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI SEMARANG
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Jl. Dr. Cipto - Sidodadi Timur No. 24 Semarang 50125 Telp. (024) 8316377 Fax. (024) 8448217

SURAT TUGAS

Nomor : 066/D/ FPIPS/IKIP PGRI/IX/ 2013

Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Semarang
memberi tugas kepada:

N a m a : Agus Sutono, S.Fil.,M.Phil
NPP : 107801284
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.I. III / b
Jabatan : Asisten Ahli
Pekerjaan : Dosen IKIP PGRI Semarang
Pada Hari/ Tgl : Selasa, 3 September 2013
Tempat : Kampus Akbid Abdi Husada Ruang Melati 3
Jl. Kol. HR. Hadianto No. 70 Sekaran Gunungpati
Keperluan : Memberi Materi dengan Tema “Pemahaman Pilar
Kebangsaan “

Demikian agar tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai harap melaporkan hasilnya .

Semarang, 2 September 2013

Mengetahui
Telah melaksanakan tugas



Widyah Setyowati, S.Si.T.
PVDik. I

Dekan FPIPS,



Titik Haryati
Dra. Titik Haryati, M.Si
NPP 856001014

PERSONALIA KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

FAKULTAS FPIPS IKIP PGRI SEMARANG

1. Ketua merangkap Anggota

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Agus Sutono, S.Fil., M.Phil.
- b. Golongan pangkat/ NPP : III-b/ 107801284
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli/IIIb
- d. Fakultas/ Program Studi : FPIPS/ PPKn
- e. Perguruan Tinggi : IKIP PGRI Semarang
- f. Bidang Keahlian : Filsafat

EMPAT PILAR KEBANGSAAN

Jati Diri Mengukuhkan Kehidupan Kebangsaan Indonesia

Agus Sutono, S.Fil., M.Phil *)

Pengantar

Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar
(John Gardner, 1992)

Mengutip apa yang dikatakan oleh Gardner di atas akan membawa refleksi yang mendalam tentang kejati dirian sebuah bangsa. Kejatidirian yang juga terus diupayakan untuk ditemukan dan dikembangkan sebagaimana Bangsa Indonesia memformulasikan Pancasila sebagai landasan nilai dalam kehidupan kebangsaannya. Formulasi yang kemudian berkembang dalam tafsir yang lebih luas dalam konsep empat pilar kebangsaan yang diharapkan akan menopang kelangsungan bangsa Indonesia.

Keberadaan dan keberlangsungan bangsa Indonesia tidak pernah dapat dilepaskan dari pilar kebangsaan yang menyangganya. Pilar kebangsaan ini adalah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui keempat pilar inilah bangsa Indonesia mampu mengenali siapa dirinya ditengah arus globalisasi yang mempertemukan semua kebudayaan, ide-ide, dan tatanan lain secara frontal. Empat pilar kebangsaan inilah yang seharusnya ditransfer kepada generasi muda diperguruan tinggi sebagai salah satu agent of change, secara cerdas dan jauh dari prinsip indoktrinisasi. Empat pilar kebangsaan inilah yang harus ditanamkan sebagai salah satu aspek penting menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Warisan terbaik para pendiri bangsa adalah “politik harapan” (*politics of hope*). Republik ini berdiri di atas tiang harapan; merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jika kita kehilangan harapan, kita kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Harapan yang positif bukanlah khayalan kosong, melainkan harapan yang berjejak pada visi yang diperjuangkan hingga menjadi kenyataan. Harapan tanpa visi bisa membawa kesesatan. Upaya menyemai politik harapan harus memperkuat kembali visi yang mempertimbangkan warisan baik masa lalu, peluang masa kini, dan kemampuannya mengantisipasi masa depan. Oleh karenanya penggalan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dan formulasi empat pilar kebangsaan dengan mempertimbangkan rasionalitas dan aktualitas dalam mengatasi masalah kekinian adalah cara tepat untuk mentransformasikan kelemahan menjadi harapan.

Melalui pengenalan empat pilar kebangsaan ini maka upaya transfer dan penanaman serta upaya mewujudkan nilai dasar kepribadian bangsa dapat diteruskan. Tumbuhnya kesadaran, sikap & perilaku, tanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang bersumber pada nilai luhur bangsa dapat pula ditegakkan. Untuk itu dalam makalah sederhana inilah empat pilar kebangsaan dikenalkan pada para mahasiswa sebagai generasi muda yang akan melanjutkan dan menjaga kelangsungan bangsa Indonesia.

1. Pancasila

Berbicara mengenai Pancasila, maka akan terdapat banyak hal yang kompleks untuk sekaligus dibicarakan. Dalam 1 dekade belakangan ini Pancasila lebih banyak tidak menjadi bahan pembicaraan baik secara resmi dalam tata pemerintahan atau dalam pembicaraan sehari-hari masyarakat akademik dan umum. Tentu ada hal yang mungkin melata belakngi hal tersebut, yang

akan coba dijawab dalam salah satu bagian dari makalah ini nantinya. Dalam latar historis, kelahiran Pancasila yang sekaligus menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak awal bangsa Indonesia menjalani kehidupannya sebagai bangsa. Dalam rekam sejarah dapat dilihat bagaimana Pancasila sejak kelahirannya menjadi nilai dasar filosofis yang dipandang sebagai jawaban yang terbaik bagi keadaan dan kondisi bangsa Indonesia. Kebhinekaan atau pluralitas masyarakat Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia menjadi berkah tersendiri jika perspektif yang dibangun adalah perspektif positif, sedangkan pluralitas dapat juga dipandang dalam perspektif negatif jika sudut pandang tersebut yang dipakai. Memahami kondisi kebhinekaan tersebut para *founding fathers* begitu arif menyikapinya dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu bukan tanpa alasan Pancasila digunakan sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia. Dan alasan tersebut tentu saja karena nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam Pancasila yang akan menjadi ruh bagi perjalanan bangsa ini.

Berkaitan dengan hal tersebut maka makalah ini akan mencoba membicarakan landasan filosofis apa saja sehingga dapat dimaknai secara mendalam sebagai dasar dalam implementasi Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila dalam Latar Sejarah Kekinian

Sejak Pancasila ditetapkan menjadi landasan atau dasar filsafat Negara maka sejak itu pula Pancasila menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Perjalanan panjang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan penuh dinamika. Pada masa Orde Lama Pancasila dianggap tidak dilaksanakan secara murni dimana ditunjukkan dengan praktek-praktek ketatanegaraan yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Hal inilah yang kemudian menjadi semangat jaman pada masa Orde Baru yang terkenal dengan slogannya pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun dalam perjalanannya pula Pancasila kemudian justru hanya menjadi sarana justifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sejatinya tidak berpihak dan sejalan lagi dengan nilai Pancasila. Dalam latar belakang yang demikian lahirlah gerakan 1998 yang menumbangkan kepemimpinan Orde Baru dibawah komando Presiden Soeharto.

Namun demikian, telah lebih dari 1 dekade sejak kejatuhan Orde Baru, Pancasila juga semakin dirasakan ditinggalkan menjauh dari apa yang seharusnya. Pancasila didegradasi sedemikian rupa sehingga pada decade terakhir ini berbicara mengenai Pancasila seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Elit-elit penguasa seolah-olah merasa malu jika mengucapkan kata Pancasila sehingga sedapat mungkin menghindari satu kata ini. Degradasi Pancasila sudah begitu parah dengan memberikan stigma bahwa Pancasila identik dengan Orde Baru, meskipun stigma tersebut sejatinya adalah sebuah kesalahan besar dalam penyusunan kerangka logika berfikir yang benar.

Untuk itu menjadi hal yang menarik kemudian ketika bangsa Indonesia harus mengarungi kehidupan global sebagai sebuah keniscayaan, yaitu sebuah kehidupan bersama yang pada satu sisi bernilai positif tetapi pada sisi yang lain juga bernilai negatif. Dalam kehidupan berbangsa secara global maka pergaulan modern antar bangsa juga membawa implikasi logis yaitu persentuhan nilai-nilai dasar berbangsa yang berbeda satu sama lain. Persentuhan nilai dasar inilah yang jika tidak secara matang disikapi akan membawa bangsa Indonesia kedalam nilai-nilai dasar yang bertentangan dengan nilai kehidupan yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian berbicara mengenai hal ini maka berbicara mengenai nilai-nilai filosofis Pancasila menemukan kontekstualisasinya sekaligus menemukankorelasinya yang sangat signifikan. Konsumerisme, hedonisme, sekulerisme dan sejumlah problem etis lainnya adalah salah satu gelombang pasang nilai yang jika tidak disikapi secara baik akan meluluhlantakkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Nilai Ketuhanan

Sekulerisme menjadi issue penting akhir-akhir ini. Sekulerisme adalah salah satu bentuk pemikiran yang memandang bahwa Negara tidak perlu turut campur tangan dalam kehidupan beragama warga negaranya. Karena beragama adalah urusan masing-masing individu yang hanya

melibatkan si individu tersebut dengan Tuhannya. Sekilas ide sekulerisme terlihat menarik namun jika ditelisik secara lebih jauh ide sekulerisme bertentangan dengan semangot dasar atau nilai filsafat yang ada pada sila Ketuhanan yang Maha Esa pada Pancasila. Atau issue lain tentang Negara Islam Indonesia yang juga menyita perhatian, merupakan hal yang harus mendapat pensikapan secara arif dan bijaksana.

Dalam sudut pandang sila 1 ini, sesungguhnya mengandung pemikiran yang mendalam bahwa Tuhan sebagai sebuah entitas mutlak yang keberadaannya diakui oleh bangsa Indonesia sebagai *causa prima*. Tuhanlah yang memungkinkan semua peristiwa terjadi, bahkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat tercaai karena berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu pula bangsa Indonesia meletakkan Nilai Ketuhanan sebagai prinsip pertama yang mendasari kehidupan berbangsa. Namun demikian Negara Indonesia bukanlah Negara agama karena kebinekaan bangsa Indonesia itu sendiri sehingga akan sangat tidak mungkin jika Negara berdasar pada salah satu agama tertentu saja, akan tetapi seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diliputi oleh suasana religius. Kaitannya dengan sekulerisme maka tidak seharusnya dilaksanakan di Indonesia mengingat bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya tetap melibatkan Negara untuk menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah sebagai salah satu perwujudan nilai religious tersebut di bumi yang sama yaitu bumi Indonesia.

Nilai Kemanusiaan

Persoalan kemanusiaan menjadi hal penting untuk dipahami secara benar. Nilai Pancasila memberikan pemahaman yang jelas mengenai paham kemanusiaan yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa. Berbicara mengenai hakikat manusia atau sifat kemanusiaan maka mau tidak mau akan bersentuhan dengan teori-teori mengenai hakikat manusia yang pernah ada. Aliran – aliran yang berbicara mengenai hakikat manusia tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, monisme yaitu pandangan filsafat yang berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari satu asas. Demikian pula hakikatnya manusia berasal dari satu asas. Monisme kemudian melahirkan sekurang-kurangnya tiga aliran besar turunannya yaitu spiritualisme, materialisme, dan atomisme. Spiritualisme menyebut bahwa satu asas hakekat manusia adalah jiwa. Materialisme berpendapat asas penyusun manusia yang tunggal adalah bersifat material atau materi. Atomisme sendiri beranggapan bahwa asas tersebut adalah atom.

Kedua, dualisme yaitu aliran yang berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari dua asas yang masing-masing berdiri sendiri, mislanya jiwa dan raga. Dalam hal antara jiwa dan raga tidak mempunyai hubungan yang serasi. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Plato dan Descartes (Sunoto, 1984:62).

Ketiga, Pluralisme yang berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari banyak asas, misalnya api, udara, air, tanah. Pendapat ini dinyatakan oleh Empedokles (490 SM) pada masa Yunani. Segala sesuatu tersusun atas unsur-unsur yang saling bertentangan, sehingga segala sesuatu tersebut juga dapat rusak, demikian juga manusia (Sunoto, 1984:62).

Keempat, evolusionisme yaitu aliran yang mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari proses evolusi. Manusia adalah hasil perkembangan secara evolusioner dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi, melalui seleksi alam dan berjalan secara otomatis. Inilah sebabnya mengapa manusia merupakan bentuk perkembangan lebih lanjut dari *missing link*. Penyebutan-penyebutan tentang manusia yang mengadopsi aliran ini antara lain *animal rational*, *animal simbolicum*, *zoon politicon*, *homo faber*, *homo educandum*, *homo politics*, *homo economicus*, dan lain-lain.

Berhadapan dengan berbagai aliran tersebut Pancasila dituntut untuk bersikap dalam memahami hakikat manusia. Bentuk penyikapan tersebut antara lain apakah menerima salah satunya, semuanya atau justru memiliki konsep yang berbeda tentang manusia?. Notonagoro dalam bukunya *Pancasila Ilmiah Populer*, 1964:34) menyatakan bahwa hakikat manusia dalam Pancasila adalah hakikat manusia yang bersifat monopluralis. Artinya satu kesatuan utuh manusia atau kemanusiaan yang terdiri dari berbagai unsur yang membentuknya.

Dengan demikian hakikat manusia dilihat dari susunan kodratnya, terdiri atas jiwa dan tubuh atau raga. Jiwa terdiri atas akal, rasa, dan kehendak. Tubuh atau raga terdiri atas unsur-unsur benda mati, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Jiwa dan tubuh merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan merupakan kesatuan.

Manusia dalam kedudukan kodratnya berunsurkan jiwa dan raga. Pemahaman mengenai kedudukan kodrat ini berbeda dengan teori-teori tentang manusia sebelumnya dimana hakikat manusia diposisikan secara dikotomis antara jiwa dan raga. Masing-masing berdiri sendiri dan tanpa berhubungan (Descartes). Dalam konsep manusia yang monopluralis ini justru mengakui bahwa unsur-unsur pembentuk manusia sesungguhnya saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Sangat tidak mungkin menafikkan keberadaan raga tanpa menyebut keberadaan jiwa. (Sunoto, 1984:64-65).

Menurut sifat kodratnya manusia pada hakikatnya bersifat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kedua sifat ini juga merupakan sebuah kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan atau ditolak atau diterima salah satunya. Pada satu sisi manusia memiliki kecenderungan untuk mementingkan kepentingan individunya sehingga ia disebut sebagai makhluk individual. Pada sisi lainnya manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada kepentingan orang lain. Inilah yang kemudian membuat manusia disebut memiliki sisi sosialitasnya.

Menurut kedudukan kodratnya manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang mampu berdiri sendiri atau mandiri atau otonom dan juga sebagai makhluk Tuhan. Keduanya berjalan secara bersamaan sebagai sebuah kebulatan yang sesuai dengan realitas yang dihadapi dan dialami saat ini. Manusia dalam hal ini dipahami memiliki dimensi kebebasan yang otonom. Ia hanya memiliki batasan-batasan yang melingkupinya yaitu lingkungan, orang lain dan juga Tuhan yang dipahami sebagai pencipta manusia (aspek religiusitas). Kesatuan rangkaian hakikat kodrat tersebut diatas, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kodrat membentuk sebuah pemahaman baru bahwa sejatinya hakikat terdalam dari manusia adalah makhluk yang bersifat monopluralis (Sunoto, 1984: 64). Dalam pemahaman yang demikian ini, hakikat manusia mendapatkan porsi yang sangat komprehensif dan mendasar. Seluruh aspek yang berkaitan dengan potensi kemanusiaan manusia terwadahi dalam tafsir manusia monopluralis ini.

Problem-problem kemanusiaan kontemporer menuntut pada sebuah pedoman yang bisa menjadi pegangan ketika kita bersentuhan dengan paham paham kemanusiaan tersebut. Dan Pancasila secara tegas memberikan pedoman tersebut.

Nilai Persatuan

Hakikat persatuan yang tertera di dalam Pancasila memberikan tafsir bahwa bangsa Indonesia membutuhkan persatuan dari kebinekaan masyarakat Indonesia. Hanya dengan persatuanlah maka sebagai bangsa, bangsa Indonesia akan tetap melangsungkan kehidupannya. Untuk itu langkah implementatif nilai Pancasila yang seharusnya dikembangkan tentu saja adalah sikap rela berkorban demi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai kerakyatan/ Demokrasi

Demokrasi menjadi salah satu isu paling menarik dalam sejarah kehidupan berbangsa diseluruh belahan dunia. Pergolakan di beberapa negara di Timur Tengah menunjukkan sebuah gejala semakin menariknya ide demokrasi untuk diterapkan. Ya, sebagai sebuah nilai, demokrasi juga menjadi salah satu semangat berbangsa bangsa Indonesia. Namun yang khas dari bangsa Indonesia adalah bahwa demokrasi yang dikembangkan haruslah demokrasi Pancasila yaitu sebuah bentuk demokrasi yang

memiliki ruh religiusitas, mengedepankan aspek-aspek humanitas, demokrasi yang bertujuan bagi pemeliharaan kesatuan, demokrasi yang melibatkan rakyat sebagai penentu dan pemilik hak yang sebenarnya, serta yang terakhir haruslah bermuara pada tercapainya keadilan sosial bagi bangsa Indonesia.

Demokrasi inilah yang membedakan dengan demokrasi lainnya. Dasar nilai filosofis inilah yang membantu langkah-langkah implementatif nilai-nilai Pancasila kaitannya dengan penumbuh kembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Nilai Keadilan

Tujuan bangsa Indonesia sebagai bangsa selain melindungi segenap tumpah darah Indonesia juga menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil adalah kata kunci dari sila kelima ini. Sebuah amanat yang mengharuskan sebuah tindakan implementatif bagi Negara dan pemerintah untuk dapat mewujudkan nilai keadilan tersebut. Keadilan adalah hak asasi bagi setiap warga Negara.

Pertanyaan Reflektif

Berangkat dari uraian di atas maka ada hal reflektif yang bias menjadikan landasan implementasi nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut :

1. Konsekuensi Pancasila sbg Dasar Filsafat Negara Indonesia
2. Nilai-nilai Pancasila bersifat Universal, Tetap dan Tidak berubah (makna nilai Pancasila yang Abstrak, Umum dan Universal)
3. Nilai-Nilai Pancasila perlu dijabarkan dalam setia aspek penyelenggaraan negara dan dalam wujud norma-norma (makna nilai Pancasila yang Umum Kolektif dan Khusus Singular dan Kongkret)
4. Pengamalan Pancasila yang Objektif
 - Adalah penamalan Pancasila dalam bentuk realisasinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara; legislatif, eksekutif dan yudikatif, mauun dalam semua bidang kenegaraan lainnya.
 - Terutama berkaitan dengan realisasi dalam perundang-undangan negara Indonesia
5. Pengamalan Pancasila yang Subjektif
 - Adalah pengamalan Pancasila dalam bentuk pelaksanaannya dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan stiap orang Indonesia.
 - Kedudukan pengamalan subjektif lebih penting daripada pengamalan objektif karena Pelaksanaan Pancasila secara objektif memerlukan sifat dasar manusia yang bermoral luhur
 - Pengamalan objektif sangat ditentukan oleh subjeknya karena yang subjektif menentukan yang objektif

Untuk itu terdapat beberapa pertanyaan reflektif lain yang dikembangkan berdasarkan logika filsafat yang telah dibangun di atas yaitu, apakah kita sudah mengembangkan nilai-nilai ketuhanan, apakah kita sudah menghormati hak orang lain, apakah kita sudah berbuat adil kepada sesama, apakah kita sudah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang bermartabat, dan banyak pertanyaan reflektif lainnya yang bisa diajukan sehingga akan semakin dapat memperpeka kesadaran kita tentang nilai-nilai Pancasila yang berbasis pada individu.

2. UUD 1945

Berbicara menegnia Undang-Undang Dasar 1945 maka tentu tidak akan pernah terlepas dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang (*staatsfundamentalnorm*), yaitu sebagai tertib hukum

tertinggi, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia, dan tetap melekat pada kelangsungan hidup negara.

UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama tahun 1999, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001, dan terakhir kali tahun 2002. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa undang-undang dasar ini bersifat singkat dan supel, yang artinya bahwa UUD ini sebagai pokok yang memuat garis-garis besar instruksi. Sedangkan supel mengandung pemaknaan bahwa undang-undang ini memahami bahwa masyarakat berkembang dan dinamis sehingga dengan sifatnya yang supel akan mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. UUD 1945 dalam tertib peraturan hukum positif yang tertinggi, disamping sebagai alat control terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hirarki tertib hukum di Indonesia. Dengan fungsinya yang demikian besar inilah maka UUD 1945 memiliki peran yang penting dalam tata kehidupan kebangsaan di Indonesia. Tidak boleh ada satau pertauran hukum pun yang kemudian melanggarnya

Dalam UUD 1945 ini juga dapat dipahami konstruksi dasar kenegaraan, yaitu antara lain mengenai konsep kekuasaan, Konsep pengambilan keputusan, konsep pengawasan, konsep partisipasi. Konsep kekuasaan mengandung prinsip –prinsip :Kekuasaan ditangan rakyat, Pembagian kekuasaan, Pembatasan kekuasaan

Demikian pentingnya UUD 1945 ini dalam system penyelenggaraan Negara sehingga mengenalinya sebagai salah satu pilar kebangsaan juga menjadi sebuah keniscayaan bagi generasi muda untuk memahaminya.

3. Bhineka Tunggal Ika

Tentulah gejala-gejala sparatisme yang akhir-akhir ini muncul di beberapa daerah di Indonesia patut untuk diperhatikan sebagai bahan refleksi lanjut tentang cita-cita bersama bangsa Indonesia yang tersusun atas kemajemukan. Bhineka tunggal ika menjadi semacam perekat dalam kebersamaan hidup sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari banyak ragam budaya, etnistas dan juga agama. Bhineka tunggal ika telah dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa. Dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular tergambarkan bagaimana telah munculnya saling penghormatan dan toleransi antar umat beragama. Tolrenasi positif dalam bidang agama sebagai salah satu isu yang sangat peka, justru telah dipraktekkan secara baik oleh lelhur bangsa Indonesia.

Sejarah juga mencatat bagaimana dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni Sukarno menyampaikan 5 prinsip dasar berkehidupan kebangsaan dan disebutkan dengan istilah Pancasila, diterima dengan semangat kebersamaan. Kebersamaan lain sebagai wujud implementasi semangat bhineka tunggal ika ditunjukkan ketika Pancasila hendak dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI. Tokoh –tokoh dari kelompok Islam dengan rasa keikhlasan menyetujui tujuh kata rumusan sila pertama dari “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islma bagi pemeluknya” (menurut Piagam Jakarta), menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana hingga kini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Semangat bhineka tunggal ika inilah yang seharusnya juga tertanam dalam diri generasi muda saat ini. Perbedaan jika dipahami dalam perspektif yang positif justru akan memperkaya dan memperkuat identitas kebangsaan kita.

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia dibangun atas dasar semangat untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. NKRI mencerminkan tiga paham Negara di dalamnya, yaitu prinsip atau paham negara persatuan, paham negara kebangsaan dan paham negara integralistik.

Paham negara kesatuan, maka NKRI terdiri dari kesatuan bangsa, pulau, budaya, golongan & agama. Mengikuti paham negara kebangsaan, maka NKRI merupakan persekutuan hidup sosial masyarakat Indonesia. Serta mengikuti paham negara integralistik, maka NKRI mengatasi semua golongan, tidak memihak dan melindungi salah satu kelompok saja.

Oleh karena itu ide-ide diluar prinsip kebangsaan yang dianut NKRI sesungguhnya tidak mencerminkan realitas sesungguhnya yang diinginkan oleh rakyat Indonesia.

Referensi

- Bertens, H., 1985, *Filsafat Barat Abad XX Jilid II Prancis*, Gramedia, Jakarta.
- Kaelan, 1999, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan Membahsa Proses Reformasi Paradigma Reformasi Masyarakat Madani*, Paradigma, Yogyakarta.
- Notonagoro, 1964, *Pancasila Ilmiah Populer*, tanpa penerbit (stensilan)
- Sunoto, 1984, *Filsafat Pancasila pendekatan melalui Metafisika-Logika-Etika*, Hanindita, Yogyakarta
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- *) Agus Sutono, S.Fil., M.Phil., dosen FPIPS IKIP PGRI Semarang
Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang

CURRICULUM VITAE

I. IDENTITAS

Nama : Agus Sutono, S.Fil., M.Phil

Tempat/Tgl Lahir : Klaten/ 01 Januari 1978

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status : Menikah

Pekerjaan & Jabatan : Dosen FPIPS IKIP PGRI Semarang
Sekretaris Program Studi PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang

Alamat : Perum. Bumi Singkil Permai I Blok E.11 Karanggeneng
Boyolali, Jawa Tengah.

No Telp/HP : 081329082020

Pendidikan Tinggi yang telah ditempuh : 1. S1 - Sarjana Filsafat (S.Fil) Ilmu Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
2. S2 - Master of Philosophy (M.Phil) Ilmu Filsafat Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
3. Mahasiswa Pascasarjana S3 Program Studi Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 1984-1990 SD Negeri Duwet I , Duwet, Ngawen, Klaten
2. Tahun 1990-1993 SMP Negeri 4 Klaten
3. Tahun 1993-1996 SMA Negeri Karangnongko Klaten
4. Tahun 1996-2000 Program Sarjana S1 Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta
5. Tahun 2008-2010 Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Filsafat UGM Yogyakarta